

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pendidikan Anak Usia Dini**

##### **2.1.1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau usia prasekolah adalah masa dimana anak belum memasuki pendidikan formal. Rentang usia dini merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan potensi dan perkembangan anak. Pengembangan potensi anak secara terarah pada rentang tersebut akan berdampak pada kehidupan masa depannya.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, Pasal I, Butir 14, yang menyatakan bahwa: “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sedangkan menurut Isjoni (2011:20) PAUD adalah suatu bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak meliputi aspek fisik dan non-fisik. Dari beberapa pendapat mengenai PAUD, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak dari usia nol sampai enam

tahun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak baik psikomotorik, kognitif, dan afektif secara optimal.

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 dinyatakan bahwa: ”1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; 2) Pendidikan anak usia dini dapat di selenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal; 3) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; 4) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal : KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; 5) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal ; pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan; dan 6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasar pada Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini termasuk kedalam satuan penyelenggara pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, karena termasuk kedalam bentuk satuan PAUD sejenis/sederajat. Pendidikan anak usia dini merupakan program binaan dari Kementrian Pendidikan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dari uraian mengenai Pendidikan Anak Usia Dini maka dapat disimpulkan bahwa PAUD adalah layanan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis bagi anak usia 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ditujukan bagi masyarakat dalam kelompok ekonomi menengah.

### **2.1.2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**

Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Sebagaimana Prinsip penyelenggaraan PAUD dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD (2013:31), antara lain :

1. Berbasis Masyarakat. Pendidikan Anak Usia Dini dikelola dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Pendidikan Anak Usia Dini

dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-royong, kerelaan, dan kebersamaan. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Desa/ Kelurahan yang beranggotakan unsur perangkat desa/kelurahan, dewan perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan Tim Penggerak PKK.

2. Mudah, Terjangkau, dan Bermutu.

- a. Mudah, Prinsip kesederhanaan menjadikan PAUD mudah dilaksanakan. Kemudahan disini mencakup aspek persyaratannya, prosesnya, dan sistem evaluasinya.
  - b. Terjangkau , Prinsip pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat serta memanfaatkan potensi lingkungan, membuat PAUD terjangkau biayanya. Semua biaya dibahas bersama sesuai dengan keperluan yang selanjutnya dicarikan sumber daya atau dibebankan kepada orang tua. Dengan semangat gotong royong, seluruh pembiayaan dipikul secara subsidi silang.
  - c. c. Bermutu, Mutu PAUD dicapai melalui:
    - (1) keterpaduan dengan layanan pembinaan orang tua melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan layanan kesehatan dan gizi melalui Posyandu; serta
    - (2) keterpaduan pemberian rangsangan pendidikan yang dilakukan di Pos PAUD (*center base*) dan yang dilakukan di rumah masing-masing (*home base*). Dengan demikian anak menerima layanan secara utuh dan terpadu yang mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, dan pendidikan; serta layanan yang berkelanjutan di PAUD dan di rumah. Disamping itu, pemanfaatan alam sekitar sebagai APE dan sumber belajar juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu.
3. Keterlibatan orangtua, Semua orang tua wajib berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, termasuk menyampaikan berbagai usulan, Khusus orang tua kelompok anak usia 3-30 bulan

wajib mengikuti kegiatan selama anak di PAUD untuk dilanjutkan di rumah, Khusus orang tua kelompok anak usia 31-72 bulan atau lebih secara bergilir membantu kader sesuai jadwal yang disepakati, Semua orangtua wajib mengikuti kegiatan pembinaan orangtua (*parenting*) secara berkala sesuai waktu yang ditentukan.

Sementara itu prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki dalam pendidikan anak usia dini menurut Suyadi (2011:80-87) antara lain:

1. **Komitmen dan ketegasan.** Komitmen adalah kesanggupan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan penuh tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini semua pihak harus mempunyai komitmen masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
2. **Profesionalitas.** Profesionalitas adalah kesesuaian antara landasan konseptual dengan praktik penyelenggaraan. Kesesuaian dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilihat dari komponen-komponen kelembagaan yang berdasarkan landasan konseptual penyelenggaraan, sehingga dapat mempraktikkannya dengan tepat. Landasan konseptual penyelenggaraan PAUD disarikan dari berbagai referensi yang berisi berbagai teori tentang pendidikan anak usia dini secara benar dan telah teruji.
3. **Komunikasi dan koordinasi.** Komunikasi dan koordinasi yang baik antar komponen dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini akan memperlancar kegiatan dan tujuan yang akan dicapai.
4. **Kompetisi.** Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat kompetisi yang dapat berlangsung didalam dan diluar lembaga. Diluar lembaga terdapat iklim kompetisi terhadap penyelenggaran PAUD yang lain sehingga profesionalitas dalam pelayanan harus selalu ditingkatkan, sedangkan didalam lembaga kompetisi tidak diartikan sebagai persaingan antar anak, namun sebagai dorongan atau motivasi kepada anak agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Dari beberapa uraian ahli, penulis menyimpulkan bahwa Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yaitu: Partisipasi aktif dari orang tua dan anak, yaitu adanya keterlibatan dalam proses pendidikan antara orang tua dan anak untuk aktif mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal, Pendidikan anak usia dini haruslah berbasis masyarakat, mudah, terjangkau, bermutu, dan mempunyai fasilitas untuk belajar sambil bermain bagi anak, Pendidikan anak usia dini harus mempunyai komitmen dan ketegasan serta profesionalitas dalam pelaksanaannya, Komunikasi, koordinasi dan kompetisi yang berjalan dengan baik antara seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

### **2.1.3. Metode Pembelajaran Anak Usia Dini**

Dalam pendidikan anak usia dini, kemampuan yang dimiliki anak pastinya mempunyai perbedaan antar anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dengan demikian agar anak mampu berkembang secara optimal perlu adanya strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga keberhasilan dalam proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh akan sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Rahman (2002:73) mengemukakan beberapa metode pembelajaran anak usia dini antara lain :

- a. Berpusat pada anak. Artinya penerapan metode berdasarkan kebutuhan dan kondisi anak, bukan berdasar pada keinginan pendidik. Pendidik menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak, bukan sebaliknya anak menyesuaikan diri terhadap kemampuan pendidik. Dengan demikian anak diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif baik fisik maupun mentalnya.
- b. Partisipasi aktif. Maksudnya metode ini ditujukan untuk membangkitkan anak untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Anak adalah subjek dan pelaku utama dalam proses belajar, bukan obyek. Anak bukan hanya pendengar dan pengamat, melainkan pelaku utama sedangkan pendidik adalah pelayan dan pendamping utama.

- c. Bersifat holistik dan integratif. Artinya kegiatan belajar yang diberikan kepada anak tidak terpisah menjadi bagian-bagian seperti pembidangan dalam pembelajaran, melainkan terpadu dan menyeluruh terkait antara satu bidang dengan bidang yang lainnya.
- d. Fleksibel. Artinya metode pembelajaran yang diterapkan pada anak usia dini bersifat dinamis tidak terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi dan cara belajar anak yang memang tidak terstruktur.
- e. Perbedaan individual Maksudnya tidak ada anak yang memiliki kesamaan walau kembar sekalipun. Dengan demikian guru dituntut untuk merancang dan menyediakan alternatif kegiatan belajar guna memberi kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitas belajar sesuai minat dan kemampuannya.

Adapun beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan anak usia dini menurut Isjoni (2011:87) yaitu :

- a. Metode bermain, merupakan bermacam bentuk kegiatan yang memberikan kepuasan pada diri anak yang bersifat nonserius, lentur, dan bahan mainan terkandung dalam kegiatan yang bersifat imajinatif ditransformasi sepadan dengan dunia orang dewasa
- b. Metode karyawisata, dengan berkaryawisata dapat membangkitkan minat anak kepada sesuatu hal, memperluas perolehan informasi sehingga anak dapat belajar dari pengalamannya sendiri dan sekaligus anak dapat melakukan generalisasi berdasarkan sudut pandang mereka.
- c. Metode bercakap-cakap, melalui bercakap-cakap anak dapat meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain dan dapat pula meningkatkan ketrampilan dalam melakukan kegiatan kerjasama dengan orang lain.
- d. Metode bercerita, kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang menarik bagi anak. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui bercerita pula dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

- e. Metode demonstrasi, dengan metode demonstrasi anak menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. Melalui demonstrasi anak diharapkan dapat belajar mengenai langkah-langkah pelaksanaan dalam melakukan suatu kegiatan.
- f. Metode proyek, metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah yang dialami dalam kegiatan sehari-hari. Cara ini juga dapat menggerakkan anak untuk melakukan kerjasama sepenuh hati, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran anak usia dini dapat antara lain Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak dan anak harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, Materi yang disampaikan bersifat terpadu dan menyeluruh

#### **2.1.4. Tinjauan Mengenai Pembinaan**

Pembinaan secara etimologis berasal dari kaya bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Menurut Musanef (1991: 11) pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan system yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.

Menurut Perwadarminta (1987:182) pembinaan adalah yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan,

sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

Jadi Pembinaan adalah suatu proses pemberian pelatihan keterampilan yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan suatu objek untuk mencapai tujuan tertentu.

Pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang / kelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

(Mathis dan Jhon, 2009. Hal .307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain :

1. Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis , dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan , yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektifitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, Yaitu Pembinaan tersebut harus di organisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan di masa depan.

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional , dan
3. Untuk mengembangkan sikap , sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Sedangkan Komponen-komponen yang dijelaskan oleh ( Mangkunegara, 2005 hal.76 ) terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur.
2. Para pembinaan yang professional.
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Peserta pembinaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam pembinaan , agar pembinaan dapat bermanfaat dan memdatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan pembinaan, tahap pelaksana pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

Sejalan dengan sejarah perkembangan dan berdasarkan situasi penerapannya, manajemen meliputi berbagai fungsi. Fungsi manajemen menurut Morris (Sudjana, 2000:51) adalah rangkaian berbagai kegiatan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, dan dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga atau bagian-bagiannya, yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Tery (Wibhawa, 2010:129) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen dengan istilah *POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controlling)*. Dalam modul Bisnis dan manajemen, Amyardi (2011:4) membedakan fungsi manajemen menjadi empat, yaitu : membuat sesuatu terjadi (*making things happen*), menghadapi persaingan (*meeting the competition*), mengorganisir orang, proyek, dan proses (*organizing people, projek, and process*), memimpin (*leading*). Sementara itu menurut Sudjana (2000:59) fungsi manajemen itu merupakan kegiatan yang berangkai, bertahap, berkelanjutan, berurutan, dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sepanjang sejarah perkembangannya, para pakar manajemen mengemukakan fungsi manajemen itu menurut rangkaian urutan yang berbedabeda. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain oleh keragaman latar belakang profesional para pakar, perbedaan situasi yang dihadapi, variasi pendekatan yang digunakan dalam menerapkan fungsi manajemen, serta berkembangnya tuntutan dan kebutuhan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan manajemen.

Menurut Siagian (Sudjana, 2000:52) fungsi manajemen digolongkan ke dalam dua bagian utama, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Fungsi pertama adalah semua fungsi manajemen yang harus secara mutlak dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan. Apabila salah satu fungsi tidak dilakukan maka kegiatan dalam organisasi akan terhambat atau mungkin akan gagal.

Fungsi yang disebut kedua, pelengkap, ialah sebagai fungsi organik sehingga fungsi organik ini dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ke dalam fungsi pelengkap ini termasuk antara lain kegiatan berkomunikasi dan memanfaatkan fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terpenting dari semua fungsi dalam pengelolaan/manajemen sebagaimana dikemukakan Weinbach (Wibahawa, 2010:126) adalah “

*“all the list suggest the effort of manage take a active role in shaping various aspect of the work environment”.*

Artinya kesemua fungsi manajemen tersebut ditujukan agar manajer memiliki peran aktif dalam mempengaruhi lingkungan kerjanya.

Menurut Milles (Sudjana, 2000:53) dalam “*management and public service*”, mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen ke dalam dua kategori yaitu: *directing* (pengarahan dan bimbingan) serta *facilitating* (pemberian bantuan). Sementara itu Sudjana (2000:56) mengemukakan 6 fungsi manajemen secara berurutan, yaitu :

1. Perencanaan, merupakan rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum (*goals*) dan tujuan khusus (*objectives*) suatu organisasi. Setelah tujuan ditetapkan, perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber yang diperlukan ke dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan, fungsi penggerakan ialah untuk mewujudkan tingkat penampilan dan partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksana yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Pembinaan, adalah upaya untuk memelihara efisiensi dan efektivitas kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penilaian, merupakan upaya yang dilakukan untuk menghimpun , mengolah, dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan yang menyangkut justifikasi, perbaikan, penyesuaian, pelaksanaan dan pengembangan suatu kegiatan
6. Pengembangan, adalah perluasan dan peningkatan kegiatan yang telah dan/ atau sedang dilakukan.

Sedangkan menurut Suyadi (2011:75) fungsi manajemen dalam pendidikan anak usia dini terdiri dari empat hal, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau kontrol dan pengawasan. Uraian-uraian berikut ini akan membahas fungsi manajemen secara umum tersebut kemudian menariknya kedalam fungsi manajemen pendidikan anak usia dini secara khusus.

### 1. Perencanaan

Rencana adalah pemikiran atau gagasan mengenai tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Kedudukan perencanaan sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Bahkan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan, tergantung pada matang atau tidaknya sebuah perencanaan. Perencanaan dalam arti yang lebih luas, khususnya perencanaan kelembagaan, perencanaan mencakup : visi misi dan fungsi organisasi, tujuan kelembagaan, strategi mencapai tujuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya kegiatan. Sedangkan perencanaan yang lebih riil dan aplikatif, biasanya dilengkapi dengan *time schedule* atau penjadwalan.

### 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pembagian tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan masing-masing sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya. Jadi setiap perencanaan harus diorganisasikan ke dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil, sehingga semua komponen mendapat tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

### 3. Kepemimpinan

Tugas utama seorang pemimpin adalah mengantar seluruh komponen yang terlibat untuk meraih tujuan bersama. Ia harus mampu menjadi motivator sekaligus inspirator untuk kemajuan lembaga maupun organisasi yang dipimpinnya. Semua tugas utama tersebut akan bermuara pada maju atau mundurnya sebuah lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan lembaga pendidikan anak usia dini harus menyeimbangkan antara kondisi lapangan yang ada dengan inisiasi yang akan diusungnya serta rencana yang akan dilakukannya. Untuk dapat menjalankan tugas ganda ini, seorang manajer atau pemimpin harus mampu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan kelembagaan kepada stafstaf yang ada dibawahnya secara tepat, sehingga semua dapat ditangani oleh ahlinya masing-masing.

#### 4. Pengawasan

Dalam konteks manajemen pendidikan anak usia dini pengawasan merupakan upaya kontrol terhadap semua komponen kelembagaan dalam merealisasikan program-program pembelajaran. pengawasan dimaksudkan untuk memotivasi, mengarahkan dan membantu memecahkan kendala di lapangan, sehingga sebuah program kelembagaan dapat berjalan secara lancar.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”, beberapa aspek standar pengelolaan pendidikan yang harus dipenuhi adalah meliputi:

1. Perencanaan program dalam kegiatan pengelolaan hal-hal yang dilakukan meliputi perumusan visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah.
2. Pelaksanaan rencana kerja yaitu tersedianya pedoman sekolah berupa struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan peran serta masyarakat dan kemitraan.
3. Pengawasan dan evaluasi meliputi program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah.
4. Kepemimpinan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di dalam satuan pendidikan yang ada.
5. Sistem informasi manajemen dengan berbasis komputer.

Dari uraian beberapa ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen, maka peneliti menyimpulkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pos pendidikan anak usia dini ada 6 aspek yang harus diingat diantaranya Perencanaan, Kepemimpinan, Pengorganisasian, Evaluasi, Pengawasan dan

Pembinaan atau pengembanagan .Dalam proses pengelolaan langkah akhir yang dilakukan terhadap semua kegiatan yang telah maupun belum terlaksana dengan menjaga keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan segala kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dalam pengelolaan kegiatan.

## **2.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita.**

### **2.2.1. Pengertian Peran Kader Bina Keluarga Balita**

Peran merupakan suatu tindakan atau perlakuan seseorang terhadap hak dan kewajibannya di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Sementara itu menurut Soekanto (2012:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu meliputi : (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, (2) Peran dalam suatu konsep perihal apa yang bisa dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Banton; Katz & Kahn mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai

*“the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries.”*

Batasan dan seperangkat harapan yang diterapkan melalui peran dalam posisi tertentu, yang ditentukan oleh incumbent peran dan pengirim peran dalam dan di luar batas-batas organisasi ( Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit.*” seperangkat pola perilaku

yang diharapkan berkaitan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial (Jodenmot, 2012:1) .

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum „peran“ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu.

Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Menurut Thompson (Ariesta, 2011:52) definisi mengenai peran adalah:

*“role theory attempts to explain the interactions between individuals in organizations by focusing on the roles they play. Role behavior is influenced by role expectations for appropriate behavior in that position, and changes in role.*

(Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam organisasi dengan fokus pada peran yang mereka mainkan. Perilaku peran dipengaruhi oleh harapan untuk perilaku yang tepat di posisi itu, dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses pengiriman dan penerimaan peran)”

Sedangkan James (Kartini, 2004:493) mengartikan *role* (peranan) adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu atau yang menjadi ciri/sifat pada dirinya. Ahmadi (2009:106) membedakan peranan menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengharapan-

pengharapan tingkah laku didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri.

Kader merupakan seseorang yang mempunyai kerelaan untuk ikut serta dalam kegiatan dimasyarakat atas dasar dorongan diri sendiri. Kader berasal dari bahasa Yunani *cadre* yang berarti bingkai. Bila dimaknai secara lebih luas yaitu orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi.

Jadi Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan diamanati oleh masyarakat untuk menjalankan tugas tertentu dan bekerja secara sukarela. Bina Keluarga Balita adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lain untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan. (Panduan operasional BKB, 2009:4)

Kader Bina Keluarga Balita adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan benar. (Bahan penyuluhan BKB, 2013:5). Dalam satu kelompok Bina Keluarga Balita yang dibagi dalam kelompok umur, maka masing-masing kelompok umur idealnya mempunyai 2-3 kader. Dari 2-3 kader tersebut dipilih : satu orang sebagai kader inti, satu orang sebagai kader piket dan satu orang sebagai kader bantu dengan tugas sebagai berikut :

1. Kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi kepada orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan
2. Kader piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya  
Kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan atau kader

piket demi kelancaran tugas mereka, dan dapat menggantikan tugas apabila kader inti/ piket berhalangan hadir.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kedudukan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dengan sukarela yang memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap keluarga balita dalam upaya membina tumbang kembang anak secara optimal.

### **2.2.2. Syarat-syarat Kader Bina Keluarga Balita**

Syarat-syarat kader Bina Keluarga Balita menurut buku panduan kader (2013:6) yaitu :

1. Laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat terhadap anak.
2. Paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat.
3. Bersedia sebagai tenaga sukarela.
4. Bersedia dilatih sebelum melaksanakan tugas.
5. Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik.

Penjelasan mengenai kader Bina Keluarga Balita (BKB) menurut Evans dan Stansbery (Ariesta, 2011:55) yaitu :

*“The BKB programme design involves the recruitment and training of 10 kader members who work as a team and divide the work as follow : 5 kaders are assigned to work with parents and 5 kaders facilitate the activities for the children. The kaders use BKB how to play with their children and stimulate their child’s development “*

Para kader BKB menggunakan buku-buku dan satu set mainan dan bahan pembelajaran untuk mengajarkan ibu cara bermain dengan anak-anak mereka dan merangsang perkembangan anak mereka.” Menurut bahan penyuluhan Bina Keluarga Balita (2013:6) tugas kader Bina Keluarga Balita antara lain:

- 1) Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan.
- 2) Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balitanya.

- 3) Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah.
- 4) Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang anak.
- 5) Membuat laporan kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas kader Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain Memberikan penyuluhan kepada orang tua balita, Mengamati tumbuh kembang ibu dan anak peserta BKB, Melakukan kunjungan rumah bila diperlukan, Membantu ibu dalam pemecahan masalah mengenai tumbuh kembang anak dan melakukan kunjungan rumah, Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Bina Keluarga Balita yang sudah dilaksanakan.

### **2.2.3. Peran Kader Bina Keluarga Balita**

Berdasarkan buku Panduan Kader Bina Keluarga Balita (BKKBN, 2008:5) kader Bina Keluarga Balita mempunyai peran sangat menentukan dalam kegiatan BKB, yaitu :

1. Menyusun jadwal kegiatan Jadwal kegiatan disepakati bersama anggota kelompok BKB dan pengelola menyangkut : waktu, tempat dan materi pertemuan.
2. Menyelenggarakan pertemuan Sesuai jadwal kegiatan yang telah disepakati, maka kader menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua yang mempunyai anak balita. Untuk kelancaran penyelenggaraan pertemuan tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : - Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dan kader lainnya - Mempersiapkan tempat pertemuan dan undangan
3. Menjadi fasilitator dalam pertemuan dan diluar pertemuan Di dalam pertemuan, selain sebagai fasilitator (orang yang memberikan penyuluhan), kader dapat pula bertindak sebagai penghubung tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas/tenaga profesional dari sektor terkait yang akan menjadi pembicara atau narasumber.

Diluar pertemuan kader melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui permasalahan yang mungkin ada dalam keluarga tentang pertumbuhan dan

perkembangan anak balita, untuk dicarikan upaya pemecahan masalah atau mengunjungi keluarga yang mempunyai anak balita yang tidak hadir dalam pertemuan BKB, selanjutnya dimotivasi untuk hadir dalam pertemuan. Melakukan rujukan para kader membantu keluarga yang mempunyai permasalahan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak balita di tempat rujukan seperti pusat pelayanan kesehatan atau para ahli dibidang perkembangan anak. Pencatatan dan pelaporan, Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan kader mengikuti pencatatan pelaporan yang ada. Selanjutnya hasil pencatatan tersebut dilaporkan kepada petugas yang membina kelompok BKB.

Dalam penyelenggaraan keberhasilan yang dicapai pasti tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung didalamnya. Menurut Kamil (2009:208) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan pendidikan non formal meliputi :

- a. Pengelolaan dan perencanaan PNF
- b. Struktur Organisasi
- c. Pemahaman tentang siklus pengelolaan program
- d. Kualitas sumber daya
- e. Mobilisasi sumber-sumber dan membangun networking
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program
- g. Mengembangkan program pembelajaran

Sementara dalam Pendidikan anak usia dini Faktor yang Berperan Penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidik, pengelola dan peran serta orang tua dan masyarakat (Depdiknas, 2006 : 17)

Lembaga pendidikan harus menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik. Karena orang tua memiliki peranan penting dalam pendidikan dan kemajuan sekolah hal tersebut karena peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang keluarga seperti sosila ekonomi, ras, etnis dan struktur keluarga. Oleh karenanya ketika ada parktik di sekolah seperti kegiatan atau program yang sering

dilakukan di sekolah hendaknya mengikutsertakan sebab peran orang tua dapat menolong dan meningkatkan partisipasinya.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

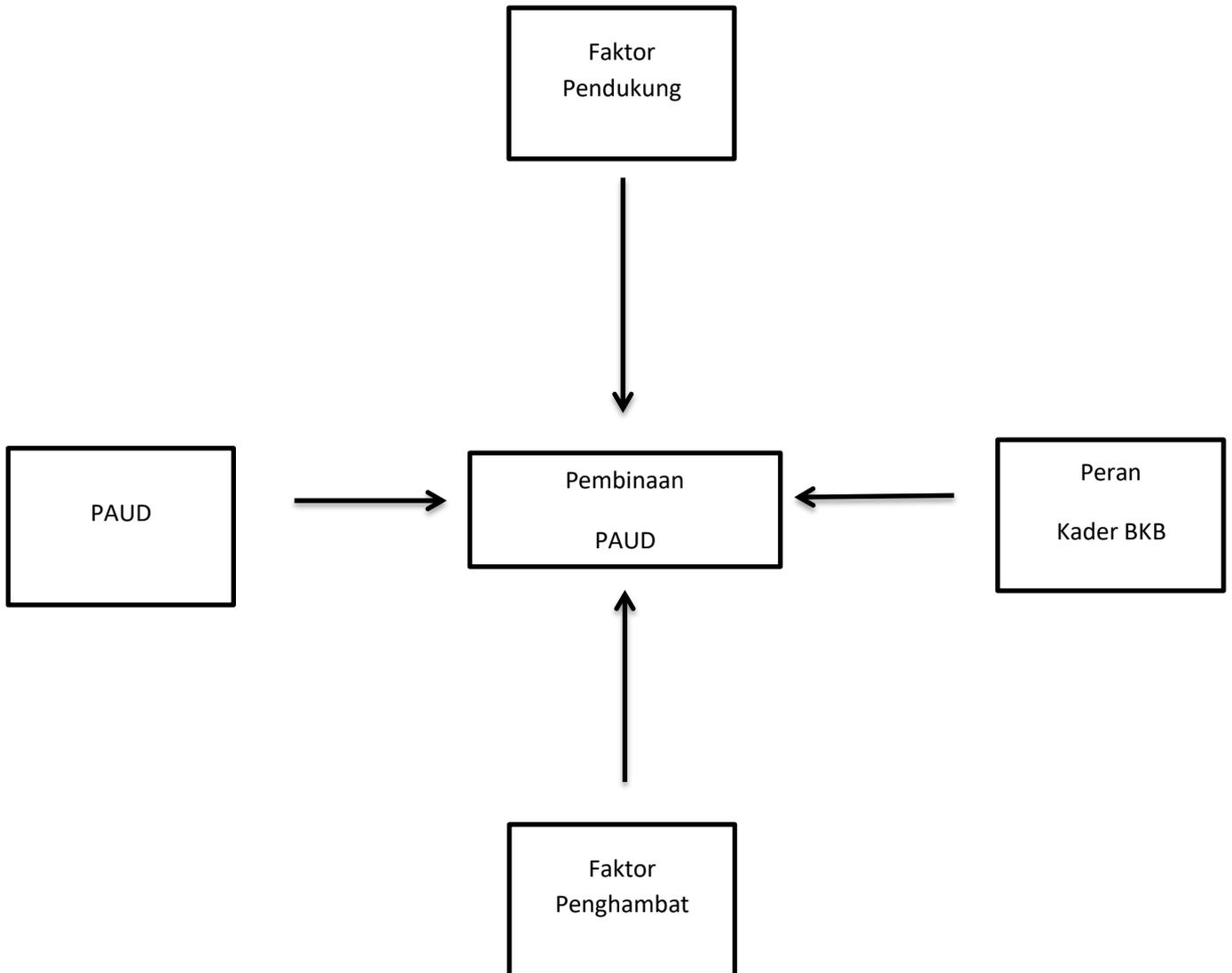
Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk layanan pendidikan yang diberikan kepada anak dari usia nol sampai enam tahun untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak baik psikomotorik, kognitif, dan afektif secara optimal. Dalam Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal : KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal : pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis (nonformal) bagi anak yang berusia 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ditujukan bagi masyarakat dalam kelompok ekonomi menengah.

PAUD merupakan layanan yang membentuk generasi yang mempunyai arah dan tujuan jelas kedepan, serta mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki anak. Dalam prosesnya Pos Pendidikan anak usia dini dibina dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan Pendidikan anak usia dini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan apabila dikelola dengan baik.

Pembinaan Pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader merupakan anggota masyarakat yang menjalankan tugas tertentu dengan penuh tanggung jawab dan sukarela. Dengan demikian kader BKB memiliki peranan yang cukup

besar dan penting dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak secara optimal serta dalam pengelolaan PAUD. Dalam menjalankan perannya, kader BKB tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat jalannya kegiatan pembinaan .



Bagan “ Peran Kader BKB dalam Pengelolaan PAUD Harapan Jaya “